

POTRET KEGIATAN



Pemerintah Launching
Peta Mudik
Wilayah Pulau Jawa dan Bali

Sebagai bagian dari strategi implementasi kebijakan satu peta (*One Map Policy*) dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi geospasial yang akurat, Badan Informasi Geospasial (BIG), melalui Pusat

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas bekerjasama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri, dan Institut Teknologi Nasional (ITENAS), me-release Peta Jalur Mudik versi offline (cetak) 2017. Peta mudik ini berbasis informasi geospasial yang akurat, terbaru dan informasinya dapat dipertanggungjawabkan terkait posisi dan lokasi geografis objek di sepanjang jalur mudik di Pulau Jawa.

Rencananya Peta Mudik ini akan disebarluaskan kepada masyarakat H-10 sebelum Hari Raya Idul Fitri, baik secara langsung ataupun melalui situs di BIG, Itenas, dan Polri. Peta Jalur Mudik versi cetak ini dapat digunakan oleh semua kalangan, terutama pemudik dengan kendaraan pribadi, sehingga masyarakat mendapatkan informasi jalur mana yang dapat dilalui, termasuk informasi jalur tol baru yang akan dibuka pada saat lebaran, informasi rawan bencana, rawan kecelakaan, dan fasilitas umum seperti Pom Bensin, ATM, Rumah Sakit, Pos Polisi, dan sebagainya yang terdapat di sepanjang jalan yang dilalui pemudik.

Peta disusun dari berbagai sumber, yaitu peta dasar RBI dari BIG, peta rawan bencana dari BIG dan BNPB, serta informasi jalan tol dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peta ini juga sudah divalidasi lapangan oleh tim BIG dan Itenas. Validasi dilakukan terutama pada jalur

utara, baik tol dan non tol, jalur tengah, dan jalur selatan Pulau Jawa. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa jalur-jalur tersebut merupakan jalur yang sering dilalui pemudik.

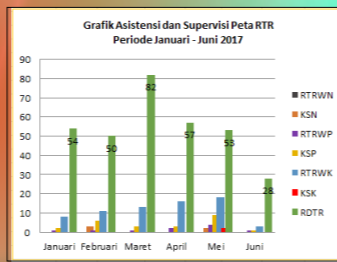
Untuk wilayah yang sering terjadi rawan kemacetan, dibuatkan informasi khusus yang lebih detail misalnya tol ujung Pelabuhan Merak, Pejagan-Semarang, Semarang-Bawen-Salatiga, Solo-Kertosono, Suramad-Surabaya-Sidoarjo, dan jalur non tol yaitu jalan alternatif Bandung-Tasik via Limbangan dan via Garut-Singaparna serta jalur Lumbir-Sumpiuh. Sebagai informasi, saat ini juga sedang disediakan Peta Mudik versi online.

Rencana ke depan BIG bersama Itenas akan membantu Polri dalam menyiapkan basis data informasi geospasial transportasi yang baik untuk wilayah seluruh Indonesia, sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait informasi jalur mudik dapat disiapkan lebih baik. Semoga masyarakat terlayani dengan baik, selamat sampai tujuan, dan kembalinya dari mudik dapat beraktivitas kembali. [Niendyawati, 2017]

Informasi :
Peta mudik 2017 dapat diunduh melalui situs BIG <http://www.big.go.id/assets/galleries/2017/peta-mudik/PETA-MUDIK-BIG-2017.pdf>

PROGRES ASISTENSI & REKOMENDASI
PETA TATA RUANG

| ASISTENSI DAN SUPERVISI PETA RTR | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|-------|
| Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Total |
| RTRWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KSN | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| RTRWP | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| KSP | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 24 |
| RTRWK | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 3 | 69 |
| KSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RDTR | 54 | 50 | 82 | 57 | 53 | 28 | 324 |
| Jumlah | 65 | 71 | 99 | 78 | 88 | 33 | 434 |



Segenap Pimpinan dan Staf
Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
Mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H

Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

RESENSI
BUKU

MENGHITUNG INDEKS KEMANDIRIAN DESA

Buku ini menekankan pada pengukuran pembangunan desa yang sangat relevan, agar Indonesia memiliki modal menyongsong peluang konstruksi pengukuran baru setelah berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Pengukuran kemandirian desa di Indonesia senantiasa memiliki kekuatan besar, karena berkaitan dengan jumlah desa yang sangat banyak serta jumlah penduduk yang melimpah. Melalui modal pengetahuan pengukuran pembangunan desa diharapkan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang mendalam dalam pengukuran baru pembangunan desa di masa mendatang. Persoalan penting yang dihadapi di banyak negara termasuk Indonesia yaitu kesenjangan dalam pengorganisasian data.

Buku ini menyajikan 10 sub pembahasan yang berbeda, yaitu Data untuk Kebijakan; Teori dan Kebijakan Desa untuk Indonesia; Pendekatan dan

Metode; Konstruksi, Indikator, dan Data Kemandirian Desa; Desain Indeks Kemandirian Desa di Indonesia; Isu Strategis Kemandirian Desa dan Kebutuhan Sektoral; Kebutuhan Program Kemandirian Desa menurut Provinsi; Kebutuhan Program Kemandirian menurut Kawasan Pedesaan; serta Indeks Kemandirian Desa untuk Alokasi Program dan Anggaran. Adapun pada bagian akhir, disampaikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

Kesepuluh sub pembahasan tersebut pada prinsipnya telah menguraikan sektor-sektor inti dan tambahan bagi pembangunan desa. Tingkat kemandirian desa berikut kebutuhan program pembangunan desa dirinci berdasarkan provinsi, tipologi kewilayahan, dan sektoral. Evaluasi kondisi masa kini dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan pembangunan desa dalam jangka menengah dan jangka panjang. [Rochmad, 2017]



Judul Buku : Indeks Kemandirian Desa
Metode, Hasil, dan Alokasi
Program Pembangunan
Editor : Ivanovich Agusta dan
Fujiartanto
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor
Indonesia
Jumlah Hal: xxiii + 266

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp. : (021) 8752062-63
Fax : (021) 8752064
Email : redaksi.pttra@gmail.com
Twitter : @pttra_big



TATA RUANG & ATLAS
NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

CATATAN BERANDA

Di tengah kekhushyukan dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadhan, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) menerima tugas tambahan dari pimpinan berupa pembuatan peta mudik sekaligus kritikan dalam proses asistensi peta tata ruang.

Tugas tambahan membuat peta mudik boleh dibilang berat tapi menantang. Waktu dan desain layout menjadi kendala. Alhamdulillah berkat semangat tim kreatif PPTRA dan bekerjasama dengan ITENAS Bandung, produk cetak jalur mudik bisa diselesaikan tepat waktu dan sudah disebar ke masyarakat sebelum H-10 jelang Idul Fitri dan data bisa diunduh di situs web BIG www.big.go.id.

Terkait kritikan lambatnya proses asistensi, PPTRA diminta bagaimana melakukan percepatan pemberian rekomendasi peta tata ruang tanpa menabrak aturan perundangan yang berlaku. Asistensi peta

tata ruang adalah amanah perundangan, suka tidak suka mesti kita ikuti. Asistensi dimaksud untuk menjamin penyediaan peta tata ruang yang akurat, update, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari amanah pasal 14 UU No. 26 tahun 2017 tentang penataan ruang, diperlukan ketelitian peta tata ruang. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) 8/2013 tentang ketelitian peta tata ruang menetapkan bahwa peta tata ruang wajib divalidasi BIG. Mekanisme validasi dan asistensi diatur dalam Perka No. 6 tahun 2014, sehingga bila ada proses yang tidak sesuai Perka maka tim teknis asistensi akan minta perbaikan sebelum rekomendasi. Masalahnya menjadi serius manakala perbaikan tidak kunjung dilakukan oleh Pemda atau diperbaiki tetapi lama.

Sifat perbaikan adalah "mandiri" artinya Pemda selaku pemohon asistensi melakukan perbaikan sendiri. Setelah semua proses dilalui maka BIG melalui PPTRA mengeluarkan surat rekomendasi atas peta

tata ruang yang dihasilkan. Lamanya proses perbaikan menuju rekomendasi inilah yang menjadi bahan kritikan. Kami paham, pemohon (Pemda) inginnya proses cepat tanpa perlu tahu berbagai kendala teknis. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha mencari terobosan agar proses asistensi bisa cepat tanpa melanggar aturan yang ada. Bukan hanya aspek teknis tetapi juga kebijakan.

Beberapa kebijakan yang kami usulkan adalah mengenai revisi Perka BIG No. 6/2014 tentang ketelitian peta tata ruang dimaksudkan agar tingkat ketelitian peta tata ruang diturunkan dari yang saat ini dilakukan, penggunaan spot 6/7 dan drone pada wilayah yang tidak tersedia CSRT tersedia, termasuk pilihan revisi Permen PU tentang RDTR. Mudah-mudahan bulan Ramadhan melahirkan berkah atas kebijakan yang baik untuk mendukung percepatan peta tata ruang. Selamat membaca edisi Ramadhan. [MD, 2017]

ISU STRATEGIS &
INFO KEBIJAKAN

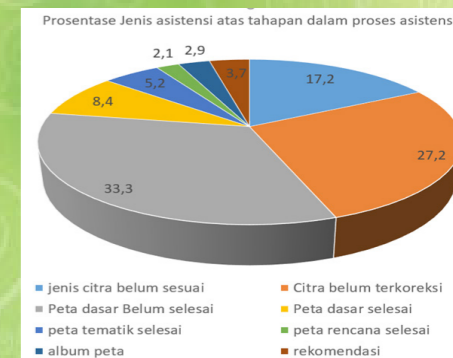
Berawal dari kritikan berbagai pihak bahwa *time dwelling* asistensi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terkesan lama, kami melakukan review dalam proses asistensi. Point pertama, kami temukan selama tahun 2016, terdapat sekitar 1500 kunjungan asistensi ke PPTRA dan 1300 diantaranya berupa asistensi RDTR. Sekitar 60-70% masalah yang dibahas adalah CSRT belum sesuai, CSRT belum terkoreksi, dan peta dasar belum selesai. Artinya masalah lamanya proses asistensi yang memerlukan bolak-balik pertemuan adalah pada peta dasar dan data dasar.

Point kedua, kami temukan dari sekitar 1013 wilayah BWP RDTR yang saat ini sedang dalam proses konsultasi, 55 % diantaranya berstatus CSRT belum terkoreksi dan 45% data CSRT sudah terkoreksi dalam proses asistensi. Percepatan hanya mungkin dilakukan pada wilayah yang 45%, inipun dengan catatan

kami mendapat suntikan energi selain dari yang diputuskan dalam RKP 2018 BIG. Kebijakan percepatan yang akan dilakukan meliputi konsultasi online, optimalisasi tim terpadu antar stakeholder, sosialisasi dan workshop, uji implementasi dan survei GCP, pemetaan RDTR wilayah prioritas, dan penyusunan pedoman asistensi. Kebijakan ini tentu memerlukan dukungan pimpinan. RKP 2018 sepertinya belum menggambarkan adanya prioritas percepatan pemetaan tata ruang. Masalah percepatan pada sekitar 55% wilayah lainnya, berada di luar wewenang kami, perlu dukungan pusat atau instansi lain.

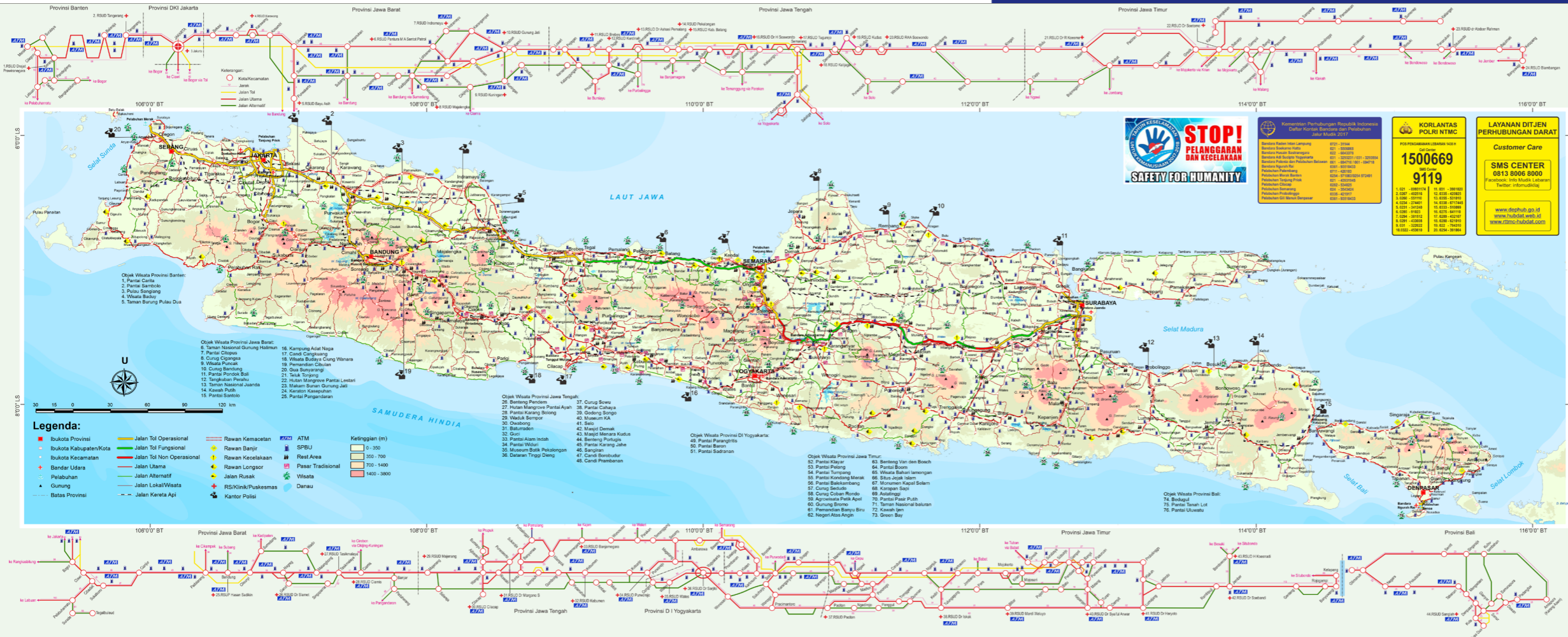
Selain dua temuan tersebut di atas, tantangan lain yang tidak kalah seriusnya adalah kenyataan bahwa wilayah yang tersedia Citra Satelit Rosulusi Tinggi (CSRT) untuk pemetaan tata ruang sampai tahun 2017, sebenarnya baru tersedia sekitar 55% dari kebutuhan nasional. Untuk wilayah tersebut, LAPAN

tengah membangun stasiun penerima CSRT mulai tahun 2018, kemampuan akuisisi sekitar 350.000 km²/tahun. Diperkirakan dalam waktu 3 tahun atau pada tahun 2021 seluruh wilayah RDTR dapat tersedia CSRT. Bila tahun 2021 baru tersedia citra mentahnya tanpa dibarengi koreksi citra, bisa dipastikan masalah yang saat ini terjadi akan berulang di tahun tersebut. Ini menjadi PR bersama nantinya, [MD, 2017]



REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
Editor: Fakhruddin Mustofa , Sri Eka Wati, Roswidyatmoko D., Ellen Suryanegara, Marhensa Aditya Hadi, Chintia Dewi, Rakyana Paksi, Rochmad Budi S., I Made Dipta S. | Desain Tata Letak: Ika Rosalika |



PETA MUDIK 2017 (1438 H) Wilayah Pulau Jawa-Bali

Disusun oleh:
 PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
 JURUSAN TEKNIK GEODESI
 itenas
 KORPS LALU LINTAS KOPOLRES REPUBLIK INDONESIA
 JASA MARGA

Dietak dan disebarluaskan Juni 2017

INFORMASI JALAN TOL 14080

DAFTAR ALAMAT DAN KONTAK RUMAH SAKIT JALUR MUDIK 2017

Premium Sponsor:
 weBGIS, EFRIT, PT. EPORT, PT. SHANWAD, PT. GORAMATA, PT. EDEKA AGENTRA

Gold Sponsor:
 WINDO SPECTRA INDONESIA, PT. WINDO SPECTRA, PT. GEORAF, PT. KEMAS

